

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak adalah alat yang di gunakan pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Pajak merupakan suatu peralihan di lapangan harta kekayaan yang berasal dari rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pengertian wajib pajak yang dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan (KUP) yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak.

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pajak untuk pembangunan nasional maka pelaksanaan kewenangan fiskal setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang di milikinya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerahnya melalui pendapatan asli daerah dan pajak progresif. Banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak salah satunya menggunakan pajak progresif.

Pajak progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus di bayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Hal tersebut menyebabkan tarif pemungutan pajak akan semakin meningkat apabila jumlah atau kuantitas objek pajak semakin banyak dan jika nilai objek pajak mengalami kenaikan maka pendapatan atau penerimaan pajak akan meningkat pula salah satu tariff pajak progresif ditetapkan atau di pungut oleh pemerintah terhadap kendaraan bermotor dari data pertumbuhan kendaraan provinsi DKI sampai dengan saat ini telah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 1.1

Jumlah kendaraan bermotor menurut jenis kendaraan (unit) di provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021-2022.

**Tabel I. 1 Jumlah kendaraan bermotor menurut jenis kendaraan (unit) di provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021-202.**

Jenis kendaraan	Tahun		
	2020	2021	2022
Motor	16.141.380	16.771.638	17.304.447
Mobil	3.365.467	3.544.491	3.766.059
Truk	679.708	713.059	748.395
Bus	35.266	36.339	37.180
Total	20.221.781	21.065.527	21.892.081

Sumber : Samsat Polda Metro jaya

Dengan di berlakukannya tarif pajak progresif dan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor bertambah seharusnya penerimaan pajak daerah menjadi semakin bertambah. Melihat realita ini diharapkan dengan diberlakukannya tarif pajak progresif bisa memaksimalkan penerimaan pendapatan pemerintah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor, sejalan dengan bertambahnya jumlah wajib pajak kendaraan bermotor. Sebagai warga negara yang baik kita seharusnya patuh dalam membayar pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat demikian pula (Lestari & DIKTI, 2015) namun demikian kebijakan tarif progresif bisa saja menyebabkan penerimaan pajak tidak signifikan.

Menurut (Khaddafi & Darwin, 2018) dari hasil penelitian analisis pengananaan tariff progresif kendaraan bermotor the four maxim tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor meningkat pesat sehingga tariff pajak progresif juga meningkat setiap tahunnya.

Menurut khaeril (2014) dari hasil penelitian analisis kontribusi dan potensi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Sulawesi selatan telah mengalami peningkatan signifikan selama periode 2009-2013.

Menurut Deby (2020) dari hasil penelitian analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama mengemukakan bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor setiap

tahunnya berbeda dikarenakan rencana pembangunan dan anggaran dari pemerintah daerah di sesuaikan yang berdampak langsung pada pendapatan asli daerah(PAD).

Dengan penerimaan pajak yang meningkat diharapkan fungsi pajak terhadap pembangunan akan semakin meningkat per kesejahteraan masyarakat sehingga tariff pajak progresif akan berdampak pada realisasi penerimaan pajak terhadap pembangunan nya semakin meningkat.

Dalam pasal 6 Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi dikenakan secara progresif yaitu untuk kendaraan motor kepemilikan pertama sebesar 1-2% dan untuk kepemilikan ke dua dan seterusnya paling rendah 2% dan paling tinggi 10%. Dan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 tahun 2015 kepemilikan kendaraan bermotor pertama 2% dan untuk kepemilikan ke 2 hingga seterusnya naik 0,5%.

Pendapatan asli daerah merupakan seluruh pendapatan yang diperoleh suatu daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peran yang sangat penting karena dapat melihat sejauh mana daerah itu sendiri sesuai dengan era saat ini yakni otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,serta pendapatan asli daerah lain-lain yang sah.Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki fungsi untuk memuaskan dan memenuhi segala kepentingan umum yang berkaitan dengan masyarakat luas. Fungsi ini dapat tercapai melalui program-program pemerintahan daerah yang pembiayaannya berasal dari Pendaptan Asli Daerah (PAD) yang di lakukan dengan pemungutan pajak yang dimana pendapatan tersebut adalah salah satunya di gunakan untuk pembangunan daerah seperti pembangunan jalan, halte, taman kota, dan pembangunan infratraktur daerah lainnya dengan melakukan pemungutan pajak yang dimana salah satunya pajak progresif.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**ANALISIS PERAN PAJAK PROGRESIF**

## **KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN DKI JAKARTA "**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan tarif pajak progresif di DKI Jakarta?
2. Bagaimana penerimaan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta?
3. Bagaimana Realisasi Pembangunan dari sektor pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor DKI Jakarta
2. Untuk mengetahui realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta
3. Untuk mengetahui realisasi Pembangunan dari sektor pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi pemerintahan  
Kegunaan bagi pemerintah, diharapkan menjadi bahan referensi dan informasi tambahan dalam pembuatan peraturan selanjutnya dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bagi Akademik  
Sebagai sarana untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama masa studi dan hasil penelitian ini dapat menambah referensi kepustakaan Universitas MH Thamrin dan mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan topik dan bahasan yang berkaitan dengan skripsi dimasa yang akan datang.

## **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini akan disajikan sistematika penulisan untuk memperoleh gambaran yang singkat dari skripsi ini yang terdiri dari lima bab. Adapun pembahasan penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan secara garis besar kajian pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pikir yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam laporan yang ditulis.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, jenis data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum yang menjadi obyek penelitian ini, yakni: Data jumlah populasi kendaraan, data penerimaan kendaraan bermotor, dan data laporan realisasi anggaran

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini akan memuat kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan akan dipaparkan bersamaan dengan saran-saran terhadap kesimpulan tersebut.